

ABSTRACT

This study aims to determine the form of the Regional Government of Tanjung Jabung Timur Regency in regulating the transportation of more loaded oil palm in Tanjung Jabung Timur Regency. The nature of the research that will be used in this research is the type of qualitative research and structured interviews with people who are considered to know what they want to research such as the Head of the Tanjung Jabung Timur Transportation Service, the Head of Traffic and Transportation, the Tanjung Jabung Timur Transportation Service, the surrounding community, road users., oil palm entrepreneurs, and oil palm transport drivers. Researchers will conduct research directly into the field to see facts in the field related to this research. The results of this study indicate that the form of the Tanjung Jabung Timur Regional Government's policy in the transportation of oil palm is the issuance of the Tanjung Jabung Timur Regent Regulation Number 21 of 2017 concerning the Regulation and Control of Goods Transportation in the Tanjung Jabung Timur Regency. Furthermore, the implementation of the Tanjung Jabung Timur regional government policy in the transportation of oil palm has not been going well, this is because in its implementation there are still shortcomings, such as there are still many violations committed by oil palm transporters, road use that is not in accordance with the provisions, and there are still many damages. on roads that cause oil palm transport schedules to collide, causing congestion.

Keywords : Policy, Oil Palm Transportation, Implementation

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Kebijakan PEMDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengatur pengangkutan kelapa sawit bermuatan lebih di Kabupaten Tanjung jabung timur. Sifat penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu tipe penelitian kualitatif dan wawancara terstruktur kepada orang-orang yang dianggap mengetahui apa yang ingin diteliti seperti Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Timur, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Timur, masyarakat sekitar, pengguna jalan, pengusaha kelapa sawit, dan supir angkutan kelapa sawit. Peneliti akan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk melihat fakta-fakta di lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur dalam pengangkutan kelapa sawit yakni di keluarkannya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Pengendalian Angkutan Barang Dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya implementasi dari kebijakan pemerintah daerah Tanjung Jabung Timur dalam pengangkutan kelapa sawit belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, seperti masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengangkut kelapa sawit, penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta masih banyaknya kerusakan pada jalan yang menyebabkan jadwal pengangkutan kelapa sawit bertabrakan sehingga menyebabkan kemacetan.

Kata Kunci : Kebijakan, Pengangkutan Kelapa Sawit, Implementasi